

**PERATURAN KALURAHAN WIROKERTEN
NOMOR 7 TAHUN 2022**



**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

**KALURAHAN WIROKERTEN
KAPANEWON BANGUNTAPAN
KABUPATEN BANTUL**



**LURAH WIROKERTEN
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL**

**PERATURAN KALURAHAN WIROKERTEN
NOMOR 7 TAHUN 2022**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH WIROKERTEN,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan, perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Kalurahan pada tahun anggaran berkenaan dianggarkan dalam APB Kalurahan.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 110);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita negara Republik Indonesia taun 2019 Nomor 1455);
14. Peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 819);

17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
18. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
19. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
20. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
21. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 37);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 55);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9);
24. Peraturan Bupati Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah daerah tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan lembaran daerah Kabupaten Bantul Nomor 140);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaran Badan Usaha Milik Kalurahan (Lmbaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 146);
27. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Nomor 128 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
28. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
29. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
30. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan, dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah kabupaten bantul Tahun 2021 Nomor 129);

31. Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pembangunan Partisipatif Masyarakat Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 13);
32. Peraturan Bupati Bantul Nomor 14 tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 14);
33. Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 tahun 2022 tentang Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Pedukuhan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 20);
34. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
35. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
36. Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 100);
37. Peraturan Bupati Bantul Nomor 103 tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 103);
38. Peraturan Bupati Bantul Nomor tahun 2022 tentang Penetapan Anggaran Dana Desa Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor);
39. Peraturan Bupati Bantul Nomor tahun 2022 tentang Penetapan Anggaran Alokasi Dana Desa Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor);

40. Peraturan kalurahan Wirokerten Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2019-2024 (Lembaran Kalurahan Wirokerten Tahun 2019 Nomor 4);
41. Peraturan Kalurahan Wirokerten Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Wirokerten (Lembaran Kalurahan Wirokerten Tahun 2020 Nomor 11);
42. Peraturan Kalurahan Wirokerten Nomor 10 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Wirokerten (Lembaran Kalurahan Wirokerten Tahun 2020 Nomor 10);
43. Peraturan Kalurahan Wirokerten Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Wirokerten Tahun 2022 Nomor 5);
44. Peraturan Kalurahan Wirokerten Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Wirokerten Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Wirokerten Tahun 2022 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN WIROKERTEN
dan
LURAH WIROKERTEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 terdiri dari :

1. Pendapatan Kalurahan

a. Pendapatan Asli Kalurahan Rp. 687.577.500,00

| | |
|---|-----------------------------|
| b. Transfer | Rp. 3.936.856.400,00 |
| c. Pendapatan lain-lain | <u>Rp. 12.000.000,00</u> |
| Jumlah Pendapatan | Rp. 4.636.433.900,00 |
| 2. Belanja Kalurahan | |
| a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan | Rp. 2.592.245.351,00 |
| b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan | Rp. 1.420.887.661,00 |
| c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp. 559.530.000,00 |
| d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp. 386.372.000,00 |
| e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Kalurahan | Rp. 183.387.077,00 |
| Jumlah Belanja | <u>Rp. 5.142.422.089,00</u> |
| Surplus/Defisit | (Rp 505.988.189,00) |
| 3. Pembiayaan Kalurahan | |
| a. Penerimaan Pembiayaan | Rp 505.988.189,00 |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | <u>Rp. 0,00</u> |
| Selisih Pembiayaan (a – b) | Rp 505.988.189,00 |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran | Rp 0,00 |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 memuat Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah Kalurahan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Wirokerten

Ditetapkan di Wirokerten

Pada tanggal, 29 Desember 2022

LURAH WIROKERTEN

TTD

RAKHMAWATI WIJAYANINGRUM

Diundangkan di Wirokerten

Pada tanggal, 29 Desember 2022

CARIK WIROKERTEN

TTD

RINI WIDIASTUTI

LEMBARAN KALURAHAN WIROKERTEN KAPANEWON BANGUNTAPAN
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 7

Noreg Peraturan Kalurahan Wirokerten, Kapanewon Banguntapan
Kabupaten Bantul : (7/WIROKERTEN/2022)



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA WIROKERTEN
TAHUN ANGGARAN 2023**

| KODE REKENING | | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | SUMBERDANA |
|---------------|-----------|--|--------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 4. | PENDAPATAN | | |
| | 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 687.577.500,00 | |
| | 4.2. | Pendapatan Transfer | 3.936.856.400,00 | |
| | 4.3. | Pendapatan Lain-lain | 12.000.000,00 | |
| | | JUMLAH PENDAPATAN | 4.636.433.900,00 | |
| | 5. | BELANJA | | |
| 1 | | <u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u> | <u>2.592.245.351,00</u> | |
| 1.1. | | Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | 1.697.920.673,00 | |
| 1.1.01 | | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 59.924.160,00 | ADD |
| 1.1.01 | 5.1. | Belanja Pegawai | 59.924.160,00 | |
| 1.1.02 | | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 591.843.552,00 | ADD |
| 1.1.02 | 5.1. | Belanja Pegawai | 591.843.552,00 | |
| 1.1.03 | | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 50.016.000,00 | PBH |
| 1.1.03 | 5.1. | Belanja Pegawai | 50.016.000,00 | |
| 1.1.04 | | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll) | 266.158.988,00 | ADD, PAD, PBH |
| 1.1.04 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 266.158.988,00 | |
| 1.1.05 | | Penyediaan Tunjangan BPD | 113.400.000,00 | ADD |
| 1.1.05 | 5.1. | Belanja Pegawai | 113.400.000,00 | |
| 1.1.06 | | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) | 20.000.000,00 | ADD |
| 1.1.06 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 20.000.000,00 | |
| 1.1.07 | | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | 127.300.000,00 | PAD |
| 1.1.07 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 127.300.000,00 | |
| 1.1.08 | | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | 44.000.000,00 | DDS |
| 1.1.08 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 44.000.000,00 | |
| 1.1.90 | | Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal dan LKK | 8.448.000,00 | PBH |
| 1.1.90 | 5.1. | Belanja Pegawai | 8.448.000,00 | |
| 1.1.91 | | Penyediaan Tunjangan Kinerja Bagi Lurah, Pamong Kalurahan, Dan Bamuskal | 89.200.000,00 | PBH |
| 1.1.91 | 5.1. | Belanja Pegawai | 89.200.000,00 | |
| 1.1.92 | | Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal | 83.717.973,00 | PBH |
| 1.1.92 | 5.1. | Belanja Pegawai | 83.717.973,00 | |

| KODE REKENING | | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | SUMBERDANA |
|---------------|------|--|-----------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1.96 | | Tunjangan Masa Kerja | 43.920.000,00 | ADD |
| 1.1.96 | 5.1. | Belanja Pegawai | 43.920.000,00 | |
| 1.1.97 | | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan | 112.392.000,00 | ADD |
| 1.1.97 | 5.1. | Belanja Pegawai | 112.392.000,00 | |
| 1.1.98 | | Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honoror | 87.600.000,00 | ADD |
| 1.1.98 | 5.1. | Belanja Pegawai | 87.600.000,00 | |
| 1.2. | | Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | 224.802.500,00 | |
| 1.2.01 | | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | 80.723.500,00 | PAD |
| 1.2.01 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 2.050.000,00 | |
| 1.2.01 | 5.3. | Belanja Modal | 78.673.500,00 | |
| 1.2.02 | | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | 47.643.000,00 | PBH |
| 1.2.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 47.643.000,00 | |
| 1.2.03 | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **) | 96.436.000,00 | PAD |
| 1.2.03 | 5.3. | Belanja Modal | 96.436.000,00 | |
| 1.3. | | Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 190.189.000,00 | |
| 1.3.01 | | Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan | 107.195.000,00 | PAD |
| 1.3.01 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 107.195.000,00 | |
| 1.3.02 | | Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) | 20.670.000,00 | PAD |
| 1.3.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 20.670.000,00 | |
| 1.3.03 | | Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa | 6.600.000,00 | ADD |
| 1.3.03 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 3.100.000,00 | |
| 1.3.03 | 5.3. | Belanja Modal | 3.500.000,00 | |
| 1.3.05 | | Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif | 44.129.000,00 | DDS |
| 1.3.05 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 40.129.000,00 | |
| 1.3.05 | 5.3. | Belanja Modal | 4.000.000,00 | |
| 1.3.90 | | Pendataan Pemutakhiran Data/Penyusunan Peta Potensi dan Sumber day a pembanguana Kalurahan | 8.595.000,00 | DDS |
| 1.3.90 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 8.595.000,00 | |
| 1.3.93 | | Pengelolaan Aplikasi E-Human Developmant Worker | 3.000.000,00 | DDS |
| 1.3.93 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 3.000.000,00 | |
| 1.4. | | Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | 192.611.678,00 | |
| 1.4.01 | | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) | 21.920.000,00 | PAD |
| 1.4.01 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 21.920.000,00 | |
| 1.4.02 | | Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) | 40.680.000,00 | PAD, PBH |
| 1.4.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 40.680.000,00 | |
| 1.4.03 | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | 8.598.078,00 | ADD |
| 1.4.03 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 8.598.078,00 | |
| 1.4.04 | | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDdes, APBDdes Perubahan, LP J dll) | 12.425.000,00 | PAD |

| KODE REKENING | | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | SUMBERDANA |
|---------------|------|---|--------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.4.04 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 12.425.000,00 | ADD, PAD |
| 1.4.05 | | Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa | 10.355.000,00 | |
| 1.4.05 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 10.355.000,00 | PAD |
| 1.4.06 | | Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan) | 20.500.000,00 | |
| 1.4.06 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 20.500.000,00 | PBH |
| 1.4.07 | | Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat | 7.850.000,00 | |
| 1.4.07 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 7.850.000,00 | DDS |
| 1.4.08 | | Pengembangan Sistem Informasi Desa | 42.723.600,00 | |
| 1.4.08 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 34.075.000,00 | PAD |
| 1.4.08 | 5.3. | Belanja Modal | 8.648.600,00 | |
| 1.4.10 | | Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD | 27.560.000,00 | PAD |
| 1.4.10 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 27.560.000,00 | |
| 1.5. | | Sub Bidang Pertanahan | 286.721.500,00 | |
| 1.5.06 | | Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | 236.261.500,00 | PBH |
| 1.5.06 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 236.261.500,00 | |
| 1.5.07 | | Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa | 50.460.000,00 | PAD |
| 1.5.07 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 39.210.000,00 | |
| 1.5.07 | 5.3. | Belanja Modal | 11.250.000,00 | |
| 2 | | <u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u> | <u>1.420.887.661,00</u> | |
| 2.1. | | Sub Bidang Pendidikan | 110.348.661,00 | |
| 2.1.01 | | Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | 53.980.000,00 | DDS |
| 2.1.01 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 53.980.000,00 | |
| 2.1.02 | | Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst) | 21.900.000,00 | BMP |
| 2.1.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 21.900.000,00 | |
| 2.1.03 | | Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat | 5.600.000,00 | DDS |
| 2.1.03 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 5.600.000,00 | |
| 2.1.08 | | Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca) | 5.250.000,00 | DDS |
| 2.1.08 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 2.250.000,00 | |
| 2.1.08 | 5.3. | Belanja Modal | 3.000.000,00 | SDD |
| 2.1.10 | | Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi | 23.618.661,00 | |
| 2.1.10 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 23.618.661,00 | |
| 2.2. | | Sub Bidang Kesehatan | 463.590.000,00 | |
| 2.2.02 | | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) | 145.145.000,00 | DDS |
| 2.2.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 145.145.000,00 | |
| 2.2.03 | | Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Keluarga Kesehatan dll) | 25.100.000,00 | BMP, DDS |
| 2.2.03 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 25.100.000,00 | |
| 2.2.04 | | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | 18.675.000,00 | DDS |

| KODE REKENING | | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | SUMBERDANA |
|---------------|------|--|-----------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.2.04 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 18.675.000,00 | |
| 2.2.09 | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD ** | 182.600.000,00 | BMP, SDD |
| 2.2.09 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 182.600.000,00 | |
| 2.2.90 | | Fasilitasi Penyelenggaraan Pos Binaan Terpadu (POSBINDU) | 11.670.000,00 | DDS |
| 2.2.90 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 11.670.000,00 | |
| 2.2.91 | | Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat | 14.150.000,00 | DDS |
| 2.2.91 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 14.150.000,00 | |
| 2.2.92 | | Pembinaan Kampung KB | 9.250.000,00 | DDS, SDD |
| 2.2.92 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 6.250.000,00 | |
| 2.2.92 | 5.3. | Belanja Modal | 3.000.000,00 | |
| 2.2.94 | | Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting | 21.500.000,00 | DDS |
| 2.2.94 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 21.500.000,00 | |
| 2.2.95 | | Pendampingan Ibu Hamil Kekurangan Gizi Kronis / Resiko Tinggi Dan Nifas | 21.500.000,00 | DDS |
| 2.2.95 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 21.500.000,00 | |
| 2.2.96 | | Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN,DII) | 14.000.000,00 | DDS |
| 2.2.96 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 14.000.000,00 | |
| 2.3. | | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 408.235.000,00 | |
| 2.3.11 | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **) | 150.275.000,00 | PBK, SDD |
| 2.3.11 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 125.000.000,00 | |
| 2.3.11 | 5.3. | Belanja Modal | 25.275.000,00 | |
| 2.3.12 | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **) | 27.960.000,00 | DDS |
| 2.3.12 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 600.000,00 | |
| 2.3.12 | 5.3. | Belanja Modal | 27.360.000,00 | |
| 2.3.14 | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) | 170.000.000,00 | PBK |
| 2.3.14 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 170.000.000,00 | |
| 2.3.15 | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **) | 60.000.000,00 | PBK |
| 2.3.15 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 60.000.000,00 | |
| 2.4. | | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 97.198.000,00 | |
| 2.4.01 | | Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN | 92.945.000,00 | SDD |
| 2.4.01 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 92.945.000,00 | |
| 2.4.91 | | Pembangunan / rehabilitasi / pemeliharaan/ peningkatan IPAL Komunal | 4.253.000,00 | DDS |
| 2.4.91 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 3.053.000,00 | |
| 2.4.91 | 5.3. | Belanja Modal | 1.200.000,00 | |
| 2.5. | | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 222.150.000,00 | |
| 2.5.02 | | Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa | 19.000.000,00 | DDS |
| 2.5.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 19.000.000,00 | |
| 2.5.91 | | Pelatihan Pengelolaan / Pengelolaan Sampah | 203.150.000,00 | BMP, DDS |

| KODE REKENING | | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | SUMBERDANA |
|---------------|------|--|------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.5.91 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 203.150.000,00 | |
| 2.6. | | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 13.000.000,00 | |
| 2.6.02 | | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) | 13.000.000,00 | DDS |
| 2.6.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 3.000.000,00 | |
| 2.6.02 | 5.3. | Belanja Modal | 10.000.000,00 | |
| 2.8. | | Sub Bidang Pariwisata | 106.366.000,00 | |
| 2.8.02 | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **) | 92.666.000,00 | DDS |
| 2.8.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 2.460.000,00 | |
| 2.8.02 | 5.3. | Belanja Modal | 90.206.000,00 | |
| 2.8.03 | | Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa | 13.700.000,00 | DDS |
| 2.8.03 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 13.700.000,00 | |
| 3 | | <u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u> | <u>559.530.000,00</u> | |
| 3.1. | | Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 215.600.000,00 | |
| 3.1.01 | | Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa | 76.725.000,00 | PAD |
| 3.1.01 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 76.725.000,00 | |
| 3.1.02 | | Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes | 23.300.000,00 | DDS |
| 3.1.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 23.300.000,00 | |
| 3.1.03 | | Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa | 61.500.000,00 | PAD |
| 3.1.03 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 61.500.000,00 | |
| 3.1.04 | | Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa | 12.250.000,00 | DDS |
| 3.1.04 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 12.250.000,00 | |
| 3.1.94 | | Penguatan Desa Aman Covid-19/Desa Tangguh Bencana | 41.825.000,00 | DDS |
| 3.1.94 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 41.825.000,00 | |
| 3.2. | | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | 118.025.000,00 | |
| 3.2.01 | | Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa | 34.300.000,00 | DDS |
| 3.2.01 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 34.300.000,00 | |
| 3.2.03 | | Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll) | 54.075.000,00 | PAD |
| 3.2.03 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 54.075.000,00 | |
| 3.2.90 | | Pembinaan Bidang Keagamaan | 21.600.000,00 | DDS |
| 3.2.90 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 21.600.000,00 | |
| 3.2.91 | | Pembinaan/Pengembangan Adat, Seni dan Tradisi | 8.050.000,00 | DDS |
| 3.2.91 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 8.050.000,00 | |
| 3.3. | | Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga | 116.755.000,00 | |
| 3.3.03 | | Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa | 59.750.000,00 | DDS |
| 3.3.03 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 55.750.000,00 | |
| 3.3.03 | 5.3. | Belanja Modal | 4.000.000,00 | |
| 3.3.05 | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa | 13.650.000,00 | SDD |

| KODE REKENING | | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | SUMBERDANA |
|---------------|------|---|------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.3.05 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 13.650.000,00 | DDS, SDD |
| 3.3.06 | | Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa | 43.355.000,00 | |
| 3.3.06 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 36.355.000,00 | |
| 3.3.06 | 5.3. | Belanja Modal | 7.000.000,00 | |
| 3.4. | | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | 109.150.000,00 | |
| 3.4.02 | | Pembinaan LKMD/LPM/LPMD | 11.525.000,00 | DDS |
| 3.4.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 11.525.000,00 | |
| 3.4.03 | | Pembinaan PKK | 20.925.000,00 | DDS |
| 3.4.03 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 20.925.000,00 | |
| 3.4.93 | | Program Kalurahan Ramah/Layak Anak | 19.700.000,00 | DDS |
| 3.4.93 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 12.700.000,00 | |
| 3.4.93 | 5.3. | Belanja Modal | 7.000.000,00 | |
| 3.4.94 | | Pelatihan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kalurahan | 57.000.000,00 | PBH, SDD |
| 3.4.94 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 57.000.000,00 | |
| 4 | | <u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u> | <u>386.372.000,00</u> | |
| 4.1. | | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 134.366.000,00 | |
| 4.1.03 | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa | 120.116.000,00 | DDS |
| 4.1.03 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 3.605.000,00 | |
| 4.1.03 | 5.3. | Belanja Modal | 116.511.000,00 | |
| 4.1.05 | | Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll) | 14.250.000,00 | DDS |
| 4.1.05 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 14.250.000,00 | |
| 4.2. | | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 161.791.000,00 | |
| 4.2.04 | | Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana | 101.200.000,00 | DDS |
| 4.2.04 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 101.200.000,00 | |
| 4.2.05 | | Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan | 12.900.000,00 | DDS |
| 4.2.05 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 12.900.000,00 | |
| 4.2.90 | | Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A) dan Peternakan | 47.691.000,00 | DDS |
| 4.2.90 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 47.691.000,00 | |
| 4.3. | | Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 14.520.000,00 | |
| 4.3.02 | | Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa | 14.520.000,00 | ADD |
| 4.3.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 14.520.000,00 | |
| 4.4. | | Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 5.600.000,00 | |
| 4.4.01 | | Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan | 2.800.000,00 | DDS |
| 4.4.01 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 2.800.000,00 | |
| 4.4.97 | | Pelatihan Pengelolaan Sampah | 2.800.000,00 | SDD |
| 4.4.97 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 2.800.000,00 | |
| 4.6. | | Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal | 13.625.000,00 | |
| 4.6.91 | | Fasilitasi Pertemuan BUMKAL dan PEMKAL | 13.625.000,00 | DDS |
| 4.6.91 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 13.625.000,00 | |

| KODE REKENING | | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | SUMBERDANA |
|---------------|------|--|------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.7. | | Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian | 56.470.000,00 | |
| 4.7.04 | | Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif | 56.470.000,00 | DDS, SDD |
| 4.7.04 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 56.470.000,00 | |
| 5 | | <u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u> | <u>183.387.077,00</u> | |
| 5.1. | | Sub Bidang Penanggulangan Bencana | 13.675.677,00 | |
| 5.1.00 | | Kegiatan Penanggulangan Bencana | 13.675.677,00 | DDS, PBH, PBP |
| 5.1.00 | 5.4. | Belanja Tidak Terduga | 13.675.677,00 | |
| 5.2. | | Sub Bidang Keadaan Darurat | 18.511.400,00 | |
| 5.2.00 | | Penanganan Keadaan Darurat | 18.511.400,00 | DDS |
| 5.2.00 | 5.4. | Belanja Tidak Terduga | 18.511.400,00 | |
| 5.3. | | Sub Bidang Keadaan Mendesak | 151.200.000,00 | |
| 5.3.01 | | Bantuan Langsung Tunai (BLT) | 151.200.000,00 | DDS |
| 5.3.01 | 5.4. | Belanja Tidak Terduga | 151.200.000,00 | |
| | | JUMLAH BELANJA | 5.142.422.089,00 | |
| | | SURPLUS / (DEFISIT) | (505.988.189,00) | |
| 6. | | PEMBIAYAAN | | |
| 6.1. | | Penerimaan Pembiayaan | 505.988.189,00 | |
| | | PEMBIAYAAN NETTO | 505.988.189,00 | |
| | | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN | 0,00 | |

Wirokerten, 02 Januari 2023

Lurah Wirokerten

Rakhmawati Wijayaningrum